

Pemertabatan Bahasa Daerah Sebagai Penguatan Jati Diri Bangsa

I Ketut Darma Laksana
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
ketutdarmalaksana@gmail.com

Abstrak

Makalah ini bertujuan mengkaji seperti apakah pemertabatan bahasa daerah dilakukan oleh masyarakat penuturnya. Seperti diketahui, Indonesia terdiri atas ratusan bahasa daerah. Di antara ratusan bahasa daerah itu, masing-masing memiliki cara tersendiri dalam pemertabatannya. Dalam hal ini, bahasa Bali yang dijadikan objek kajian, memiliki kekhasannya. Untuk mengungkap kekhasan itu diterapkan metode penelitian sosial mutakhir dan metode penelitian lapangan. Dengan metode yang pertama, pemertabatan bahasa daerah itu dipengaruhi oleh kuasa pejabat daerah dengan ditandai oleh perubahan paradigma. Sementara itu, dengan metode yang kedua diperoleh tata cara pemertabatan yang ditandai oleh konsepsi etnografis bahwa pemuliaan aksara Bali telah menggeser huruf Latin, dan penempatannya di atas nama-nama yang ditulis dengan huruf Latin. Hal itu telah menandai adanya penguatan jati diri bangsa karena huruf Latin bukan produk asli orang Bali.

Kata Kunci: *pemertabatan bahasa, kuasa, pemuliaan aksara*

Abstract

This paper aims to examine how the dignity of regional language is carried out by the community that speaks them. As is known, Indonesia consists of hundreds of regional languages, each of the certainly has its own way of expressing dignity. In this case, the Balinese language which is used to the object of study has its own characteristics. To uncover these characteristics, the latest social research methods and field research methods are applied. With the first method, language dignity is influenced by the power of regional officials, marked by a paradigm shift. Meanwhile, with the second method, dignification procedures are obtained which are based on the ethnographic conception that the glorification of the Balinese script has shifted the position of Latin letters, and their placement above names written in Latin letters. This has marked a strengthening of national identity because Latin letters are not a native product of the Balinese people.

Keywords: *language dignity, power, literacy glorification*

1. Pendahuluan

Indonesia terdiri atas ratusan bahasa daerah yang memiliki cara tersendiri dalam hal pemertabatannya. Dalam hal ini, bahasa Bali sebagai objek kajian ini, telah melalui sejarah yang panjang dalam pemertabatannya. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh masyarakat pendukungnya, seperti seminar, lomba berbahasa Bali, penulisan buku, pembakuan bahasa Bali, sampai ke penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Hal lainnya yang tidak kalah penting ialah pembinaan dan pemakaian bahasa Bali yang baik dan benar oleh para guru di sekolah-sekolah (lihat misalnya penelitian

yang dilakukan oleh Suryati et.al, 2018).

Aksara Bali sebagai wujud dasar pendukung kebudayaan Bali saat ini memperoleh legitimasi yang tinggi karena sejarahnya yang sangat panjang sebelum dikenal huruf Latin. Pemuliaan aksara Bali, bukan lagi bahasanya, telah memperlihatkan adanya perubahan paradigma bahwa huruf Latin bukanlah produk asli orang Bali. Pemertabatan aksara Bali itu dapat dianggap sebagai wujud penguatan jati diri bangsa.

Masalah yang harus dipecahkan dalam kajian ini adalah: pertama, bagaimakah terjadinya perubahan paradigma tersebut? Kedua, bagaimanakah tata cara pemertabatan aksara Bali tersebut dilakukan? Masalah yang pertama dapat dipecahkan dengan melakukan pembongkaran atas sistem yang dibangun dalam sebuah peraturan, seperti Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 dan peraturan atau undang-undang yang mendorong adanya perubahan paradigma tersebut. Sementara itu, masalah yang kedua dapat dipecahkan dengan melihat tata cara pemuliaan aksara Bali berdasarkan konsepsi etnografis masyarakat Bali.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian sosial mutakhir dan metode penelitian lapangan. Metode penelitian sosial mutakhir bersifat lebih efisien dibandingkan dengan metode penelitian sosial konvensional yang dilakukan dengan wawancara bersemuka dalam pemerolehan informasi (Kridalaksana, 1980). Dengan metode penelitian sosial mutakhir itu, informasi apa pun sudah tersedia dalam media sosial. Dalam kajian ini, informasi dapat diunduh melalui situs dari Biro Humas Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Bali (Redaksi9.com/read/1361). Sementara itu, metode penelitian lapangan tetap diterapkan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai penelitian ilmiah dalam pemerolehan data meskipun data nama-nama di ruang publik dapat diakses melalui Google Maps.

3. Hasil

3.1. Perubahan Paradigma

Pemuliaan aksara Bali yang termuat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 mengarah pada adanya perubahan paradigma. Bukan lagi bahasa, melainkan aksaranya yang diperjuangkan sebagai penguatan jati diri bangsa. Alasan yang melandasi kebijakan itu ialah bahwa aksara Bali memiliki sejarah yang panjang sebelum dikenal huruf Latin.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali tersebut tidak berdiri

sendiri. Beberapa pemikiran seperti yang termuat dalam, baik peraturan daerah maupun pusat, sangat berpengaruh pada kebijakan yang diambil saat ini.

3.2. Tata Cara Pemartabatan

Nama-nama di ruang publik, seperti nama jalan, sekolah, lembaga adat, instansi pemerintah, dan fasilitas umum, ditulis dengan menggunakan aksara Bali. Sementara itu, huruf Latin tetap digunakan untuk menuliskan nama-nama di ruang publik itu. Hal yang khas dalam penulisan nama-nama di ruang publik itu ialah pelafalan huruf Latin pada nama-nama itu, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing (Inggris), ke aksara Bali tetap mengikuti kaidah pelafalan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh:



Gambar 1. Aksara Bali-Bahasa Indonesia
Pura Kahyangan Prajapati Kaler, Desa Adat Ubung



Gambar 2. Aksara Bali-Bahasa Inggris
Bali International Hospital

4. Pembahasan

Pemikiran kritis dari Derrida (1997), dengan “dekonstruksi”nya diterapkan untuk membongkar, baik Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 serta peraturan lainnya maupun tata cara pemartabatan yang dilakukan. Derrida (1997) menyebut peraturan gubernur serta peraturan lainnya dan tata cara pemartabatan itu sebagai sebuah teks. Sebagai sebuah teks, di dalam tersirat adanya “sistem” yang

dibangun, dan hal inilah yang harus dibongkar sehingga diperoleh alasan yang mendasarinya.

4.1. Perubahan Paradigma

Foucault (2016) menyebut perubahan paradigam yang terjadi saat ini sebagai sebuah “epistem”, yakni pemikiran yang sesuai dengan perkembangan zaman/eranya. Sementara itu, Foucault (2017) mengatakan bahwa perubahan paradigma yang terjadi dalam masyarakat, seperti dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 itu, dipengaruhi oleh “kuasa” (power). Namun, ternyata peraturan gubernur tersebut tidak berdiri sendiri karena sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah membuat peraturan yang memuat materi muatan lokal. Selain itu, peraturan daerah Bali itu memperoleh kekuatannya karena sudah ada pula Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang pentingnya pelestarian bahasa daerah.

Bourdieu (1991) mengatakan bahwa perubahan paradigma tersebut dipengaruhi oleh “motivasi” yang dapat menggerakkan sebuah kebijakan, apalagi kebijakan itu dianggap menghasilkan hal yang lebih baik pada zamannya. Sejalan dengan pandangan Foucault (2017) di atas, Bourdieu menyebut kebijakan seorang pemimpin dalam bentuk sebuah peraturan sebagai “kekuasaan simbolik”.

Pemikiran kritis lainnya seperti Gramsci (EMHAF, 2018), dengan konsepsi “hegemoni”nya, juga menyebut bahwa perubahan paradigma itu berkaitan dengan fenomena “kekuasaan”. Menurut Gramsci, dalam konteks politik, pada dasarnya bahasa (peraturan) merupakan alat untuk sebuah hegemoni dalam memenangkan persaingan di dalam berdemokrasi.

Dilihat dari sudut budaya, menarik pandangan dari Geertz (1992) bahwa seorang pemimpin, kebetulan orang Bali, dapat dimetaforiskan sebagai “ayam jago” (cock fight), yang memiliki ciri-ciri, seperti kuat, pemenang, pahlawan, dan sejenisnya. Menurut Geertz, metafora yang dibangun dengan membuat perbandingan bahwa Pulau Bali sendiri memang mirip ayam jago, tidak seperti Pulau Jawa yang tidak berbentuk (tidak dapat dimetaforiskan!).

4.2. Tata Cara Pemartabatan

Pemartabatan bahasa Bali dengan cara memuliakan aksaranya didasari oleh pandangan masyarakatnya. Penggantian huruf Latin ke dalam aksara Bali sudah tepat berdasarkan pertimbangan bahwa aksara Bali memiliki sejarah yang panjang sebelum

dikenal huruf Latin. Saat ini sudah saatnya pemikiran masyarakat mengalihkan pandangan ke aksara Bali untuk mendukung penguatan jati diri bangsa. Dengan demikian, cara pemuliaan dengan menggunakan aksara Bali dalam menuliskan nama-nama di ruang publik memperlihatkan praktik percontohan yang baik sebagai bukti pelaksanaan peraturan gubernur.

Penempatan aksara Bali di atas nama-nama di ruang publik, baik yang berbahasa Indonesia maupun asing (Inggris), tidak dapat dilepaskan dari konsepsi orang Bali bahwa sesuatu yang utama harus diletakkan di atas. Dalam konteks inilah dapat dilihat tata cara penempatan aksara Bali belum sepenuhnya berupa penerapan konsepsi itu. Nama-nama di ruang publik, seperti nama-nama jalan, hotel, dan fasilitas umum, belum secara taat menempatkan aksara Bali di atas nama-nama yang ditulis dengan huruf Latin. Sebaliknya, nama-nama di ruang publik, seperti nama sekolah, lembaga adat, fasilitas umum, dan instansi pemerintah sudah secara taat asas menempatkan aksara Bali di atas huruf Latin. Sebagai contoh:



Gambar 3. Aksara Bali-Bahasa Indonesia
Nama Sekolah: Sekolah Negeri 2 Denpasar



Gambar 4. Nama Fasilitas Umum: Terminal Ubung

Di sisi lain, namap-nama di ruang publik, seperti nama jalan dan hotel, belum

menunjukkan cara penempatan aksara Bali secara taat asas.



Gambar 5. Aksara Bali-Bahasa Indonesia
Nama Jalan: Jl. Pulau Sulawesi



Gambar 6. Bahasa Indonesia-Aksara Bali
Nama Jalan: Jl. Diponogoro



Gambar 7. Aksara Bali-Bahasa Indonesia
Nama Hotel: Hotel Viking



Gambar 8. Bahasa Indonesia-Aksara Bali

Nama Hotel: Hotel Catur Adi

5. Kesimpulan

Sejalan dengan perjalanan waktu, dari masa ke masa, perubahan pemikiran tidak dapat dihindari. Pemerintah daerah, melalui Peraturan Gubernur Bali Nmor 80 Tahun 2018, telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam pemuliaan aksara Bali. Pemuliaan aksara Bali itu sudah menunjukkan adanya penguatan jati diri bangsa. Hal yang penting dicatat bahwa hampir semua lapisan masyarakat di Bali, seperti pengusaha makanan siap saji, apotek, perusahaan, warung makanan, semua berpartisipasi mendukung peraturan gubernur.

6. Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (2020). *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*. (Spephanus Anwar Herwinarko, Penerjemah). Yogyakarta: IRCioD.
- Derrida, J. (1997). *Of Grammatology*. (Gayatri Chakravorty Spivak, Penerjemah). The Johns ahopkins University Press.
- EMHAF (2018). *Gramsci: Pikiran yang terbebas dalam jeruji*. Yogyakarta: Sociality.
- Foucault, M. (2016). *Arkeologi Pengetahuan*. (Inyiak Ridwan Musir, Penerjemah). Yogyakarta: Pelangi.
- Foucault, M. (2017). *Kuasa/Pengetahuan*. (Yudi Santoso, Penerjemah). Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothos.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. (Yudi Santoso, Penerjemah). Yogyakarta: Kanisius.
- Kridalaksana, H. (1980), “Suatu rintisan dalam historiografi Indonesia”. Dalam: *Ayatrohaedi, peny., Seri Penerbitan Ilmiah 3*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, hlm. 1—9).
- Redaksi9.com/read/1361. (Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Bali).
- Suryati, N. M. et.al (2018). *Pembinaan dan pemakaian bahasa Bali yang baik dan*

benar melalui guru-guru bahasa Bali di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. ([https://erepo.unud.id/eprint PDF/](https://erepo.unud.id/eprint/PDF/)).